

ANALISIS DAMPAK KEPENDUDUKAN TERHADAP TINGKAT KRIMINALITAS DI PROVINSI BANTEN

Riny Handayani
gmriny@yahoo.co.id

Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan Serang Banten, Telp. 0254-280330

Abstrak : Masalah kemiskinan, pengangguran dan keadaan kependudukan seperti Fertilitas, Mortalitas dan Mobilitas/Migrasi penduduk memberikan kontribusi terhadap terjadinya konflik sosial dan kriminalitas secara langsung maupun tidak langsung. Kriminalitas di wilayah Provinsi Banten mengalami peningkatan cukup signifikan atau mencapai 68 persen sepanjang tahun 2014 dibandingkan tahun 2013. Peningkatan kriminalitas konvensional dan transnasional di wilayah hukum Polda Banten dibandingkan tahun lalu merujuk data, tindak kriminalitas tahun 2013 sebanyak 3.569 kasus, sedangkan ditahun 2014 meningkat menjadi 5.857 kasus. dari 5.857 kasus yang terjadi di wilayah Polda Banten, sebanyak 2.191 kasus dapat diselesaikan. Jumlah tersebut menurun dibanding 2013, dari 3.569 kasus yang terjadi, sebanyak 2.077 kasus yang dapat terselesaikan (Polda Banten, 2015). Pertumbuhan penduduk yang cepat sebagai provinsi baru, tingkat pengangguran yang tinggi, kesenjangan pendidikan dan antar kabupaten/kota, kesenjangan kesejahteraan antar kabupaten/kota dan wilayah rawan kriminalitas merupakan latarbelakang penelitian ini. Menggunakan Teori Ekologi Kriminalitas (Meliala, 2011). hasil analisis bahwa dari variabel Kualitas Penduduk yang berperan kuat mempengaruhi kejadian kriminalitas adalah aspek Kepadatan Penduduk, variabel Kuantitas Penduduk adalah aspek Angka Partisipasi Sekolah usia 19-24 tahun, Ketersediaan Fasilitas Kesehatan dan, Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Sedangkan untuk variabel Mobilitas Penduduk yang berpengaruh secara positif secara kuat dan signifikan adalah aspek Migrasi Risen. Dua solusi utama mengatasi permasalahan ini adalah melaksanakan secara konsisten aturan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan agar semua penduduk terutama migran terdata dengan baik dan pemerataan pembangunan dan menyediakan lapangan pekerjaan di setiap wilayah terutama desa atau kota-kota kecil lainnya sehingga kepadatan penduduk tidak terkonsentrasi pada satu atau beberapa wilayah saja dan mengantisipasi kejadian kriminalitas akibat migrasi.

Kata Kunci : Dampak Kependudukan, Tingkat Kriminalitas

Abstract : Problems of poverty, unemployment and population conditions such as Fertility, Mortality and Mobility / Population Migration contributes to the occurrence of social conflicts and criminality directly or indirectly. Criminality in the Province of Banten has increased significantly or reached 68 percent during the year 2014 compared to the year 2013. Increase in conventional and transnational criminality in the jurisdiction of Banten Police compared to last year referring data, crime in 2013 as many as 3,569 cases, while in 2014 increased to 5.857 case. of 5,857 cases that occurred in the Banten Police Region, as many as 2191 cases can be resolved. The number decreased compared to 2013, from 3,569 cases, 2,077 cases that can be resolved (Banten Police, 2015). Rapid population growth as a new province, high unemployment rate, education gap and inter-district / city, welfare gaps between districts / municipalities and crime prone areas are the background of this study. Using Ecological Theory of Crime (Meliala, 2011). result of analysis that from variable of Quality of Population which have strong role affecting crime incident is aspect of Population Density, Population Quantity variable is aspect of School Participation Rate of age 19-24 years, Availability of Health Facility and, Percentage of Open Unemployment Rate (TPT). As for the variable Mobility of People who have positively influenced strongly and significantly is the aspect of Migrasi Risen. The two main solutions to overcome this problem are consistent implementation of rules relating to population administration so that all residents, especially migrants, are well-regulated and equitable with development and provide employment in each region, especially villages or other small towns, so that the population density is not concentrated in one or some areas and to anticipate the crime caused by Migration.

Keywords: Population Impact, Crime Level

1. PENDAHULUAN

Masalah kemiskinan, pengangguran dan tekanan hidup dalam hal ini memberikan kontribusi Terhadap terjadinya konflik sosial dan kriminalitas secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh tekanan penduduk. Jumlah penduduk yang terlalu banyak dan terdistribusi tidak merata, sumberdaya yang terbatas dan perpindahan/pergerakan penduduk memberikan sumbangan untuk

terlahirnya konflik. Hal tersebut di atas setidaknya yang terjadi di wilayah kajian penelitian yaitu Provinsi Banten .Tingginya angka kriminal di Indonesia disebabkan oleh berbagai macam faktor, antara lain kemiskinan, disfungsi norma dan hukum, ketidak harmonisan unsur terkait serta karakter bangsa yang sudah bergeser. Hal ini diperparah dengan system pendidikan yang tidak lagi mengajarkan nilai-nilai etika termasuk pendidikan agama yang hanya

menekankan pada aspek kognitif saja (Randan, 2012).

Kriminalitas di wilayah Provinsi Banten mengalami peningkatan cukup signifikan atau mencapai 68 persen sepanjang tahun 2014 dibandingkan tahun 2013. Peningkatan kriminalitas konvensional dan transnasional di wilayah hukum Polda Banten dibandingkan tahun lalu merujuk data, tindak kriminalitas tahun 2013 sebanyak 3.569 kasus, sedangkan ditahun 2014 meningkat menjadi 5.857 kasus. dari 5.857 kasus yang terjadi di wilayah Polda Banten, sebanyak 2.191 kasus dapat diselesaikan. Jumlah tersebut menurun dibanding 2013, dari 3.569 kasus yang terjadi, sebanyak 2.077 kasus yang dapat terselesaikan (Polda Banten, 2015)

Waktu terjadinya tindak pidana sepanjang 2014 pun meningkat, dari sebelumnya setiap 1 jam 36 menit terjadi satu kasus kriminal, dari yang sebelumnya setiap 2 jam 38 menit terjadi satu kasus kriminalitas pada tahun 2013. Resiko penduduk yang terkena tindak pidana meningkat dari 69 orang orang di 2013 menjadi 113 orang di 2014. Sementara itu, kasus kriminal yang menonjol dan menjadi perhatian

masyarakat seperti pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, curanmor penipuan dan narkoba, secara kualitas justru meningkat (Polda Banten, 2015).

Untuk tipologi kasus 3 besar di wilayah Polda Banten, kasus terbesar adalah Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua (Curanmor R2) sebanyak 1.387 kasus dengan wilayah tertinggi kasus di Resort Serang, kasus kedua adalah Pencurian Dengan Pemberatan sebanyak 1.212 kasus dominan di wilayah Resort Serang dan kasus Penipuan Perbuatan Curang sebanyak 673 kasus juga dominan terjadi di wilayah Resort Serang.

Atas dasar uraian di atas, maka tulisan ini akan membahas dan menguraikan tentang Dampak Kependudukan Terhadap Tingkat Kriminalitas di Provinsi Banten.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Tiga faktor yang mempengaruhi langsung pertumbuhan penduduk suatu wilayah adalah kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas) dan perpindahan/pergerakan penduduk (migrasi/mobilitas).Fertilitas adalah komponen utama pertumbuhan penduduk yang bersifat menambah

jumlah penduduk. Indikator fertilitas meliputi : 1) Angka Kelahiran Kasar (*Crude Birth Rate/CBR*), yaitu banyaknya kelahiran per 1.000 penduduk pada pertengahan tahun ; 2) Angka Kelahiran Menurut Umur (*Age Specific Fertility Rate/ASFR*), yaitu perempuan pada umur tertentu adalah banyaknya kelahiran pada perempuan umur tertentu per 1.000 perempuan pada umur yang sama pada pertengahan periode;3) Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate/TFR*), yaitu mengukur banyak anak yang akan dilahirkan oleh suatu kohor perempuan selama masa reproduksi mereka.

Faktor yang kedua adalah Mortalitas; Mortalitas atau kematian adalah hilangnya tanda-tanda kehidupan secara permanen. Ukuran kematian menunjukkan suatu angka atau indeks yang dipakai sebagai dasar untuk menentukan tinggi rendahnya tingkat kematian suatu penduduk. Indikator Mortalitas meliputi : 1)Angka Kematian Kasar/ *Crude Death Rate (CDR)* yaitu banyaknya kematian per 1.000 penduduk pada pertengahan tahun ; 2) Angka Kematian Menurut Umur (*Age Specific Death Rate/ASDR*), yaitu perempuan pada umur tertentu adalah

banyaknya kematian pada perempuan umur tertentu per 1.000 perempuan pada umur yang sama pada pertengahan periode; 3)*Infant Mortality Rate (IMR)* atau Angka Kematian Bayi, adalah jumlah kematian bayi berumur di bawah 1 tahun selama tahun X dibagi jumlah kelahiran selama tahun X dikalikan 1.000.

Sedangkan faktor ketiga yang merupakan komponen utama dalam Kependudukan adalah Migrasi;Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat/wilayah yang melampaui batas administratif suatu wilayah (Setiadi, 1999). Umumnya migrasi penduduk mengarah pada wilayah yang “subur” pembangunan ekonominya, karena faktor ekonomi sangat kental mempengaruhi orang untuk pindah. Hal ini dipertegas lagi oleh Sri Rum Giyarsih, 2009 yang menyatakan bahwa migrasi sebenarnya merupakan suatu reaksi atas kesempatan ekonomi pada suatu wilayah.

Variabel

Kependudukan dan Kriminalitas

Masalah kemiskinan, pengangguran dan tekanan hidup dalam hal ini memberikan

kontribusi terhadap terjadinya konflik sosial dan kriminalitas secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi tekanan penduduk, jumlah penduduk yang terlalu banyak dan tidak rata distribusinya, sumber daya alam dan manusia yang terbatas dan perpindahan atau pergerakan penduduk memberikan sumbangan akan lahirnya konflik.

Sebagai contoh, konflik di Sambas, Sanggau Ledo dan Sampit (semuanya di Kalimantan pada kurun waktu 1996-2000) terjadi antara penduduk asli dengan pendatang yang bermigrasike Kalimantan.

Perbedaan kultur dan strata sosial, ekonomi serta kepentingan politik pihak tertentu menyebabkan perbedaan yang nyata sehingga konflik begitu cepat tercipta (Direktorat Analisis Dampak Kependudukan, BKKBN 2011).

Ekologi adalah salah unsur yang dapat memahami Kriminalitas (Meliala, Adrianus, 2011). Dalam kriminologi, ekologi secara mudah dimengerti sebagai pengaruh eksternal, misalnya tinggi rendah pengangguran, urbanisasi, pertumbuhan ekonomi, atau kepadatan penduduk (densitas) di suatu wilayah

Merujuk data dari Badan Pusat

Statistik (BPS) secara nasional, tentang angka kejahatan (*crime rate*) dan resiko terjadinya kejahatan pada penduduk (*crime clock*), dapat diasumsikan bahwa provinsi dengan jumlah penduduk banyak dan kepadatan penduduk tinggi adalah tinggi juga angka kejahatannya.

Studi di tiga wilayah (Kalbar, Sulsel dan Sumut) dan di tiga kota (Pontianak, Makassar dan Medan) pada tahun 2011 menunjukkan bahwa sebagai provinsi yang memiliki banyak penduduk di masing-masing pulau dan juga kota terbanyak penduduknya di setiap provinsi, diikuti oleh angka kejahatannya yang juga adalah tinggi. Berkaitan dengan hal di atas, Di Provinsi Kalbar, Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara juga ditemukan angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tinggi, utamanya untuk anak terlantar, anak bermasalah dengan hukum, keluarga fakir miskin, pekerja seks komersial dan korban penyalahgunaan NAPZA. Dalam banyak kasus, tidak jarang PMKS kemudian berkembang menjadi pelaku kejahatan (*criminal*) apabila tidak ditanggulangi dengan baik.

Dalam kaitannya dengan kependudukan, tidak dipungkiri,

masalah kemiskinan, pengangguran, migrasi, kelaparan dan tekanan kehidupan memberikan kontribusi terhadap keamanan negara maupun keamanan selaku individu dari kriminalitas.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode penelitian yang dilakukan adalah metode kuantitatif dengan tehnik deskriptif yang didukung dengan metode kualitatif Tujuan dari penelitian kuantitatif adalah mendapatkan gambaran terukur kaitan antara variabel kependudukan dengan tingkat kriminalitas, sedangkan metode kualitatif pendukung menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan tehnik kegiatan survei dan kajian literatur.

proses pengukuran menghubungkan dua variabel dalam sebuah teori dan sebuah hipotesis. tiga tingkatan yang harus dipertimbangkan adalah konseptual, operasional, dan empiris. Pada tingkat yang paling abstrak, kita mungkin tertarik pada

hubungan kausal (timbal balik) antara dua konstruksi, atau hipotesis konseptual. Pada tingkat definisi operasional, pengujian hipotesis dilakukan untuk menentukan tingkat keterkaitan antar indikator. Pada tingkat operasional tingkat biasa digunakan korelasi, statistik, kuesioner, dan sejenisnya. Tingkat ketiga adalah realitas empiris atau keadaan di lapangan. Indikator operasional (mis., kuesioner item) mulai dijabarkan ke konstruksi.(Neuman, 2014:209).

Data yang telah dikumpulkan, kemudian diolah, dan selanjutnya dianalisis dengan bantuan SPSS menggunakan metode korelasi Pearson Product Moment dilanjutkan dengan menghitung Koefisien Determinasinya, sehingga terlihat berapa besar pengaruh variabel bebas $X_1 =$ Kuantitas Penduduk, $X_2 =$ Kualitas Penduduk dan $X_3 =$ Mobilitas Penduduk terhadap variabel terikatnya $Y =$ Angka Kriminalitas. Uji normalitas dan reabilitas data dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukan uji analisis di atas.

4. HASIL PENELITIAN

Trend Kejahatan dalam Statistik Kriminal Resmi Kepolisian Daerah

Banten dalam analisis ini, trend kejahatan diarahkan pada kecenderungan pertumbuhan dan penurunan angka kejahatan yang didasari pada data statistik kriminal resmi Polda Banten, khususnya di wilayah hukum Polres Serang, Pandeglang, Lebak dan Cilegon untuk tahun 2012-2013 dan 2014. Untuk mengukur trend kejahatan digunakan rumusan yang dikemukakan oleh Larry Siegel, yaitu dengan mengetahui angka perimbangan kejahatan atau *Crime rate*, yakni jumlah kejahatan dibandingkan dengan jumlah penduduk, atau nilai

rata-rata kejahatan per 10.000 penduduk (Siegel, 2008).

Korelasi (hubungan) Kuantitas Penduduk (X1) dengan Angka Kriminalitas (Y)

Sebelum menggunakan Uji Korelasi antara variabel terikat (Y) : Angka Kriminalitas dengan variabel bebas (X1) : Kuantitas Penduduk yang dalam hal ini diwakili oleh Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), Kepadatan Penduduk dan *Total Fertility Rate* (TFR) maka terlebih dulu dilakukan uji normalitas.

Uji Korelasi Product Moment (Pearson) Kuantitas Penduduk (X1) : Laju Pertumbuhan Penduduk, Kepadatan Penduduk dan *Total Fertility Rate*/TFR Terhadap Angka Kriminalitas.

Correlations

		LPP	logpdttduduk	logkriminalitas
LPP	Pearson Correlation	1	,883	,128
	Sig. (2-tailed)		,000	,692
	N	12	12	12
logpdttduduk	Pearson Correlation	,883	1	,522
	Sig. (2-tailed)	,000		,082
	N	12	12	12
logkriminalitas	Pearson Correlation	,128	,522	1
	Sig. (2-tailed)	,692	,082	
	N	12	12	12

Korelasi Antara Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Dengan Angka Kriminalitas

Dari output di atas terlihat bahwa koefisien korelasi antara Laju

Pertumbuhan Penduduk (LPP) dengan Jumlah Kriminalitas adalah sebesar 0,128 dengan nilai signifikansi (2-tailed) sebesar 0,692 > nilai $\alpha = 5\%$,

sehingga dapat disimpulkan hubungan antara LPP dengan Angka Kriminalitas adalah sangat lemah (mendekati nilai 0), walaupun positif (jika LPP naik, maka Jumlah Kriminalitas juga meningkat, demikian sebaliknya), namun tidak signifikan (nilai koefisien korelasi lebih dari nilai $\alpha = 5\%$).

Seperti telah dibahas sebelumnya, walaupun korelasinya lemah tetapi terdapat hubungan searah antara Laju Pertumbuhan Penduduk dengan Angka Kriminalitas. Kabupaten Pandeglang memiliki LPP terendah di Provinsi Banten yaitu sebesar 0,86 pada tahun 2014 dan terbukti diikuti oleh Angka Kriminalitas yang juga rendah. Hal yang sama juga berlaku di Kota Cilegon yang memiliki LPP relatif tinggi yaitu 1,82 pada tahun 2014 juga diikuti oleh Angka Kriminalitas yang cenderung tinggi.

Korelasi Antara Kepadatan Penduduk Dengan Angka Kriminalitas

Dari output di atas terlihat bahwa koefisien korelasi antara Kepadatan Penduduk dengan Angka Kriminalitas adalah sebesar 0,522 dengan nilai signifikansi (2-tailed) sebesar 0,082 < nilai $\alpha = 10\%$,

sehingga dapat disimpulkan hubungan antara Kepadatan Penduduk dengan Jumlah Kriminalitas adalah kuat (di atas nilai 0,500), positif (jika Kepadatan Penduduk naik, maka Angka Kriminalitas juga meningkat, demikian sebaliknya), dan signifikan (nilai koefisien korelasi kurang dari nilai $\alpha = 10\%$).

Dapat diprediksi dengan makin padatnya penduduk di suatu wilayah berpotensi meningkatkan kejadian kriminalitas. Kepadatan penduduk dimana salahsatunya adalah akibat migrasi akan menimbulkan persaingan di antara penduduk terutama yang usia kerja untuk memperoleh pekerjaan. Masalahnya, jumlah Angkatan Kerja yang meningkat belum tentu diikuti oleh ketersediaan lapangan pekerjaan. Akibatnya, Angkatan Kerja yang berstatus menganggur berpotensi melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung meningkatkan angka kriminalitas. Hal ini relevan dengan teori yang menyatakan kuantitas kejahatan di dalam masyarakat mempunyai erat dengan kondisi-kondisi dan pertentangan kebudayaan, yang terdiri atas proses beberapa aspek kehidupan masyarakat, salah satunya

adalah kuantitas penduduk (Abdulsyani, 1987).

Meningkatnya tindakan kriminalitas di wilayah yang padat yang biasanya terjadi pada wilayah bercirikan perkotaan terjadi karena kesenjangan sosial antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Daya tampung wilayah yang semakin sempit, lahan yang semakin menyusut sementara penduduk terus bertambah. Kepadatan penduduk dan kendala yang dihadapi oleh pemerintah kota untuk mengatur populasi yang terus meningkat setiap tahunnya. Pada akhirnya banyak dari penduduk yang terabaikan dan luput dari pengawasan pemerintah yang apada akhirnya memicu kenaikan tindakan kriminalitas.

Dalam penelitian ini terbukti, wilayah yang memiliki kepadatan penduduk rendah akan diikuti dengan kejadian kriminalitas yang juga rendah, begitupun sebaliknya. Kabupaten Lebak yang memiliki kepadatan penduduk 364 perkm² memang memiliki Angka Kriminalitas terendah. Sebaliknya, sebagai gambaran Kota Tangerang Selatan yang kepadatan penduduknya duapuluh kali lipat Kabupaten Lebak

berkorelasi positif dengan tingginya Angka Kriminalitas.

Korelasi Antara *Total Fertility Rate* (TFR) Dengan Angka Kriminalitas

TFR di Provinsi Banten mengalami penurunan menurut hasil SDKI dari 2.64 anak per wanita usia subur pada SDKI 2007 menjadi 2.5 per wanita usia subur pada SDKI 2012. Sebagai informasi TFR merupakan potret rata-rata jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang wanita pada akhir masa reproduksinya. Berikut adalah data untuk *Total fertility Rate* (TFR) dan *Crude Birth Rate* (CBR) untuk masing-masing kabupaten/kota :

Untuk kasus di Provinsi Banten, Angka Kelahiran Total/ *Total Fertility Rate* (TFR) yang terlihat tinggi terdapat di Kabupaten Pandeglang dan Lebak, masing-masing 2.98 dan 2.55 dan yang paling rendah adalah Kota Tangerang Selatan yaitu 1.93. Angka Kelahiran Kasar/ *Crude Birth Rate* (CBR) terlihat tinggi terdapat di Kota Cilegon dan Kabupaten Pandeglang, masing-masing 20.19 dan 19.22 dan yang paling rendah adalah Kota Tangerang Selatan yaitu 16.54. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel

di bawah ini:

**Angka Kelahiran Total/ Total Fertility Rate (TFR)
dan Angka Kelahiran Kasar/ Crude Birth Rate (CBR)
Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten**

Kabupaten/Kota	Total Fertility Rate (TFR)	Crude Birth Rate (CBR)
Pandeglang	2.98	19.92
Lebak	2.55	17.88
Tangerang	2.29	19.08
Serang	2.45	18.21
Kota Tangerang	2.10	18.71
Kota Cilegon	2.52	20.19
Kota Serang	2.59	19.69
Kota Tangerang Selatan	1.93	16.54

Sumber : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Banten, 2015

Dengan menggunakan SPSS, dicari hubungan antara TFR dengan :
Angka Kriminalitas untuk tahun 2012, 2013 dan 2014, maka didapat hasil sebagai berikut

Correlations

		TFR	Logkriminalitas
TFR	Pearson Correlation	1	-,445
	Sig. (2-tailed)		,147
	N	12	12
logkriminalitas	Pearson Correlation	-,445	1
	Sig. (2-tailed)	,147	
	N	12	12

Hubungan antara Angka Kelahiran Total atau *Total Fertility Rate (TFR)* dengan Angka Kriminalitas adalah negatif, lemah dan tidak signifikan. Hal ini berarti bahwa jika TFR naik maka tidak akan diikuti oleh kenaikan Angka Kriminalitas demikian sebaliknya.

Hal yang menarik adalah terjadi

korelasi negatif antara TFR dengan Angka Kriminalitas. Telah disebutkan sebelumnya, ini dapat diartikan jika TFR naik maka Angka Kriminalitas akan turun demikian sebaliknya. Kasus konkret yang teridentifikasi adalah Kabupaten Pandeglang sebagai wilayah dengan TFR tertinggi, sebaliknya memiliki Angka Kriminalitas yang

rendah. Sedangkan, Kabupaten dan Kota Serang yang memiliki TFR di bawah Kabupaten Pandeglang malah memiliki Angka Kriminalitas tertinggi dibanding wilayah lain. Kota Tangerang Selatan walaupun berada pada wilayah hukum Polda Metro Jaya yang notabene memiliki Angka Kriminalitas dibanding Dalam hal ini Kualitas Penduduk diwakili oleh PersentaseTingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Persentase Penduduk Miskin, Angka

wilayah hukum Polda Banten ternyata memiliki TFR terendah di Provinsi ini. Maka sudah jelas terlihat pola hubungan antara TFR dengan Angka Kriminalitas.

Korelasi (hubungan) Kualitas Penduduk (X2) dengan Angka Kriminalitas (Y).

Harapan Hidup (AHH), Angka Partisipasi Sekolah usia 19-24 tahun dan Ketersediaan Fasilitas Kesehatan

Korelasi Antara Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Dengan Angka Kriminalitas

		logpenganggur	logkriminalitas
logpenganggur	Pearson Correlation	1	,422
	Sig. (2-tailed)		,172
	N	12	12
logkriminalitas	Pearson Correlation	,422	1
	Sig. (2-tailed)	,172	
	N	12	12

Korelasi (Hubungan) antara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dengan Angka kriminalitas positif namun lemah dan tidak signifikan. Seperti telah dibahas sebelumnya, jumlah Angkatan Kerja yang meningkat belum tentu diikuti oleh ketersediaan lapangan pekerjaan. Akibatnya, Angkatan Kerja yang berstatus menganggur berpotensi melakukan tindakan kejahatan yang

secara langsung meningkatkan angka kriminalitas. Data statistik menguatkan pola ini, walaupun sifatnya lemah dan tidak signifikan. Hal ini dapat dimaklumi karena unit analisis wilayah yang dibandingkan relatif sedikit, tapi jika merujuk perbandingan yang terjadi di wilayah Serang yang memiliki jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi yaitu sebesar 13,69% pada tahun 2013

memiliki Angka Kriminalitas yang juga tertinggi di wilayah hukum Polda Banten. Begitupun dengan kondisi di Kabupaten Tangerang yang memiliki

jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) relatif tinggi yaitu sebesar 11,94% pada tahun 2013 diikuti oleh kejadian kriminalitas yang juga tinggi.

Korelasi Antara Jumlah Penduduk Miskin Dengan Angka Kriminalitas
Correlations

		logkriminalitas	logkemiskinan
Logkriminalitas	Pearson Correlation	1	-,345
	Sig. (2-tailed)		,273
	N	12	12
Logkemiskinan	Pearson Correlation	-,345	1
	Sig. (2-tailed)	,273	
	N	12	12

Hubungan antara jumlah kemiskinan dengan jumlah kriminalitas adalah negatif dan tidak signifikan. Pola yang unik juga ditemukan kaitannya antara persentase penduduk miskin di suatu wilayah dengan kejadian kriminalitas yang terjadi. Di Provinsi Banten teori kaitan searah dan signifikan antara kemiskinan dengan kriminalitas terbantahkan. Pola yang terjadi di wilayah kajian, wilayah yang terkategori sebagai wilayah miskin dengan indikator persentase penduduk miskin yang tinggi malah memiliki Angka Kriminalitas yang rendah.

Walaupun memerlukan penelitian lebih lanjut, faktor heterogen penduduk di wilayah yang bercirikan perkotaan yang identik dengan wilayah

kaya dan memiliki persentase penduduk miskin yang rendah cenderung memiliki kejadian tindak kejahatan yang tinggi. Heterogen penduduk yang berkaitan secara langsung dengan kepadatan penduduk dan kejadian migrasi di wilayah bercirikan perkotaan menyebabkan tingginya persaingan antara penduduk untuk mendapatkan pekerjaan dan bertahan hidup sehingga berdampak pada tingginya Angka Kriminalitas.

Fakta konkret yang terjadi di wilayah kajian, Kabupaten Pandeglang yang memiliki persentase penduduk miskin terbanyak di Provinsi Banten yaitu 9,28% malah terdata memiliki kejadian kriminalitas yang rendah dibandingkan dengan wilayah Cilegon

dan Serang.

Korelasi Antara Angka Harapan Hidup (AHH) Dengan Angka Kriminalitas
Correlations

		TKRIMINALITAS	AHH
TKRIMINALITAS	Pearson Correlation	1	,068
	Sig. (2-tailed)		,833
	N	12	12
AHH	Pearson Correlation	,068	1
	Sig. (2-tailed)	,833	
	N	12	12

Hubungan antara Angka Harapan Hidup (AHH) dengan Angka Kriminalitas adalah positif dan sangat lemah juga tidak signifikan. Dapat diartikan, walaupun terjadi secara kebetulan (karena tidak signifikan) dan tidak kuat (karena koefisien korelasi

hanya 0,068) tapi terindikasi kejadian kriminalitas yang tinggi dijumpai pada wilayah hukum yang penduduknya memiliki Angka Harapan Hidup (AHH) yang juga tinggi dan begitu pula sebaliknya.

Korelasi Antara Angka Partisipasi Sekolah Tingkat Tinggi (19-24 tahun) Dengan Angka Kriminalitas
Correlations

		logkriminalitas	pendidikan
logkriminalitas	Pearson Correlation	1	*,614
	Sig. (2-tailed)		,034
	N	12	12
Pendidikan	Pearson Correlation	*,614	1
	Sig. (2-tailed)	,034	
	N	12	12

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Hubungan antara pendidikan dengan tingkat kriminalitas adalah negatif, kuat dan signifikan (pada level kepercayaan 5 %). Artinya jika pendidikan mengalami peningkatan maka tingkat kriminalitas akan menurun, demikian sebaliknya.

Peningkatan kualitas

sumberdaya manusia dapat terlihat dari peningkatan tingkat pendidikan rata-rata suatu daerah. Peningkatan tersebut merupakan dampak dari peningkatan permintaan akan pendidikan untuk mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang lebih baik. Hal ini karena untuk memperoleh pekerjaan di

sektor modern sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan (Todaro & Smith, 2004). Dari sisi lain, tingginya partisipasi masyarakat untuk bersekolah juga akan menurunkan kemampuan mereka untuk melakukan tindak kriminalitas karena waktu mereka sebagian besar akan habis untuk

bersekolah (Lochner, 2007)

Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang tidak menekankan pentingnya mendapatkan pendidikan lebih mungkin untuk tinggal di jalanan dan melakukan hal-hal yang cenderung kriminal.

Korelasi Antara Ketersediaan Fasilitas Kesehatan Dengan Angka Kriminalitas
Correlations

		TKRIMINALITAS	Kesehatan
TKRIMINALITAS	Pearson Correlation	1	-,471
	Sig. (2-tailed)		,122
	N	12	12
kesehatan	Pearson Correlation	-,471	1
	Sig. (2-tailed)	,122	
	N	12	12

Hubungan antara kesehatan dengan tingkat kriminalitas adalah negatif, lemah dan tidak signifikan. Meskipun terdapat hubungan negatif yaitu jika fasilitas kesehatan ditambah,

maka tingkat kriminalitas menurun namun hubungan ini terjadi secara kebetulan saja (tidak signifikan = tidak nyata).

Korelasi (hubungan) Mobilitas Penduduk (X3) dengan Tingkat Kriminalitas (Y)
Correlations

		TKRIMINALITAS	Migrasirisen
TKRIMINALITAS	Pearson Correlation	1	,745**
	Sig. (2-tailed)		,005
	N	12	12
migrasirisen	Pearson Correlation	,745	1
	Sig. (2-tailed)	,005	
	N	12	12

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hubungan antara Migrasi Risen dengan tingkat kriminalitas adalah positif, kuat dan signifikan (pada level kepercayaan 1 %). Artinya jika migrasi risen mengalami kenaikan, maka tingkat kriminalitas juga akan meningkat, demikian sebaliknya.

Provinsi Banten yang memiliki letak geografis strategis disatu sisi berpengaruh langsung terhadap kejadian kriminalitas utamanya karena proses pergerakan (mobilitas) dan perpindahan (migrasi) penduduk. Panjangnya garis pantai yang dimiliki Provinsi Banten menjadikan wilayah berada di paling barat pulau Jawa ini rawan akan terjadinya berbagai tindak kriminalitas. Salah satu, kriminalitas yang paling rawan adalah penyelundupan atau kedatangan imigran ilegal melalui pelabuhan tikus. Berdasarkan data dari Polda Banten, sejak tahun 2008 hingga 2013 jumlah imigran ilegal sebanyak 2.369 jiwa. WNA ilegal terbanyak berasal dari Afganistan sebanyak 1.022 jiwa. Provinsi Banten menjadi pintu masuk dan keluar kasus *people smuggling*. Lokasi pintu masuk dan keluar itu adalah wilayah Anyer, Panimbang dan Sumur,

Kabupaten Pandeglang.

Salah satu pemicu dari munculnya tindakan kejahatan di masyarakat perkotaan yang dicirikan dengan angka migrasi yang tinggi yaitu lemahnya nilai-nilai sosial pada masyarakat kota, masyarakat kota cenderung memiliki gaya hidup individualistik. Dari kondisi itulah yang dimanfaatkan oleh pelaku kriminal. Pelaku kriminal menganggap kota yang memiliki kegiatan mobilitas penduduk tinggi sebagai 'perpustakaan' untuk belajar kejahatan sehingga kriminalitas akan terus berulang. Dalam wilayah kajian, Tangerang walaupun berada di luar wilayah hukum Polda Banten memiliki tingkat migrasi yang relatif tinggi di Provinsi Banten memang diikuti oleh kejadian kriminalitas yang juga tinggi. Hal yang sama juga terjadi di wilayah Banten bagian Selatan yang diwakili Kabupaten Pandeglang dan Lebak yang terdata masih memiliki tingkat migrasi yang relatif rendah juga diikuti oleh pola kriminalitas yang juga rendah.

Dampak Kependudukan Terhadap Kriminalitas di Provinsi Banten

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh dari hasil penghitungan secara statistik dari variabel kependudukan yang diwakilkan oleh variabel Kualitas, Kuantitas dan Mobilitas Penduduk terhadap Kriminalitas di Provinsi Banten didapat hasil sebagai berikut :

Pertama, kaitannya dengan Kuantitas Penduduk yang diwakilkan oleh Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), Kepadatan Penduduk dan *Total Fertility Rate* (TFR), maka yang berkontribusi sangat kuat dan signifikan adalah hubungan antara Kepadatan Penduduk dengan Jumlah Kriminalitas (di atas nilai 0,500), positif (jika Kepadatan Penduduk naik, maka Angka Kriminalitas juga meningkat, demikian sebaliknya), dan signifikan (nilai

Harapan Hidup (AHH), Angka Partisipasi Sekolah usia 19-24 tahun dan Ketersediaan Fasilitas Kesehatan. Dari analisis didapatkan hasil bahwa yang berkorelasi positif dan signifikan terhadap Angka Kriminalitas diantara kelima faktor adalah Persentase Tingkat

koefisien korelasi kurang dari nilai $\alpha = 10\%$). Sedangkan faktor Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) suatu wilayah walaupun berkorelasi positif (jika LPP tinggi maka Angka Kriminalitas tinggi) tetapi kontribusinya dapat dikatakan relatif rendah. Hal sebaliknya ditemukan data bahwa hubungan antara Angka Kelahiran Total atau *Total Fertility Rate* (TFR) dengan Angka Kriminalitas adalah negatif, lemah dan tidak signifikan. Hal ini berarti bahwa jika TFR naik maka tidak akan diikuti oleh kenaikan Angka Kriminalitas demikian sebaliknya.

Kedua, kaitan antara Kualitas Penduduk yang diwakilkan oleh Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Persentase Penduduk Miskin, Angka.

Pengangguran Terbuka (TPT) yaitu sebesar 0,42 walaupun jika dihitung kontribusinya hanya sebesar 16% terhadap Angka Kriminalitas seluruhnya. Kejadian kriminalitas tertinggi ditemukan pada wilayah hukum yang terindikasi memiliki Persentase Tingkat Pengangguran

Terbuka (TPT) terbanyak. Kemudian faktor kedua yang berkorelasi positif adalah Angka Harapan Hidup (AHH) yaitu sebesar 0,07 atau kontribusinya terhadap kejadian kriminalitas sebesar 0,5% terhadap Angka Kriminalitas seluruhnya. %. Hal yang sama juga terjadi pada faktor Angka Partisipasi Sekolah usia 19-24 tahun dan Ketersediaan Fasilitas Kesehatan. Kedua faktor ini menghasilkan korelasi negatif atau dapat diartikan kejadian kriminalitas yang tinggi ditemui pada wilayah yang penduduknya memiliki Angka Partisipasi Sekolah usia 19-24 tahun dengan angka korelasi -0,61 atau berkontribusi sebesar 36% dan Ketersediaan Fasilitas Kesehatan yang rendah dengan angka korelasi -0,471 atau berkontribusi sebesar 22,10% terhadap Angka Kriminalitas seluruhnya.

Hal yang di luar perkiraan adalah terdapatnya korelasi yang negatif antara Persentase Penduduk Miskin dengan Angka Kriminalitas. Hal ini dapat diartikan bahwa berdasarkan data, kejadian kriminalitas banyak ditemukan di wilayah yang memiliki Persentase

Penduduk Miskin rendah dan begitupula sebaliknya. Korelasi yang didapat adalah -0,35 dan berkontribusi sekitar 12,25 %.

Ketiga, kaitan antara Mobilitas Penduduk yang diwakili oleh Migrasi Risen terhadap Angka Kriminalitas menunjukkan korelasi positif dan signifikan dengan koefisien korelasi sebesar 0,75 atau berkontribusi sebesar 56,25% terhadap Angka Kriminalitas seluruhnya. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa faktor migrasi dominan menyebabkan kejadian kriminalitas terjadi disuatu wilayah. Hasil penghitungan ini juga menghasilkan kesimpulan bahwa wilayah yang memiliki angka migrasi tinggi diikuti oleh kejadian kriminalitas yang juga tinggi dan begitu pula sebaliknya.

Sebenarnya, ketiga variabel kependudukan ini memang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ketiganya memiliki keterikatan yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap kejadian kriminalitas. Tetapi, berdasarkan penghitungan secara statistik variabel mobilitas penduduk selain memiliki

kontribusi paling besar dalam memengaruhi kejadian kriminalitas, Mobilitas penduduk juga berpengaruh langsung terhadap kepadatan penduduk. Dengan makin meningkatnya jumlah penduduk Provinsi Banten sedangkan disisi lain luas geografisnya tidak berubah akan menyebabkan kepadatan penduduknya semakin tinggi. Kejadian ini diperparah dengan terjadinya kesenjangan kepadatan antar kabupaten/kota yang ada di Provinsi Banten.

Variabel perpindahan (migrasi) dan pergerakan (mobilitas) penduduk dalam penelitian ini berperan paling signifikan terhadap tingkat kriminalitas. Meningkatnya kepadatan penduduk suatu wilayah akibat migrasi masuk dan mobilitas penduduk yang tinggi di suatu wilayah mengiringi pertumbuhan Angkatan Kerja yang juga naik di wilayah tersebut. Pertumbuhan Angkatan Kerja yang tinggi dalam hal ini menjadi masalah karena menyebabkan sumber-sumber ekonomi semakin terbatas sehingga mengakibatkan persaingan pencarian kerja semakin tinggi di wilayah tersebut

dan secara tidak langsung berpengaruh pada kenaikan kriminalitas.

5. PENUTUP

Dalam kajian Dampak Kependudukan Terhadap Kriminalitas di Provinsi Banten ini didapatkan hasil analisis bahwa dari variabel Kualitas Penduduk yang berperan kuat mempengaruhi kejadian Kriminalitas adalah aspek Kepadatan Penduduk, variabel Kuantitas Penduduk adalah aspek Angka Partisipasi Sekolah usia 19-24 tahun, Ketersediaan Fasilitas Kesehatan dan, Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Sedangkan untuk variabel Mobilitas Penduduk yang berpengaruh secara positif secara kuat dan signifikan adalah aspek Migrasi Risen.

Terjadi temuan unik dalam kajian ini, yaitu didapat hasil korelasi yang negatif dan kuat antara Persentase Penduduk Miskin dengan Angka Kriminalitas. Koefisien korelasi sebesar -0,35 dalam hal ini dapat diartikan bahwa wilayah yang memiliki kejadian kriminalitas tinggi justru terjadi di wilayah yang memiliki Persentase

Penduduk Miskin rendah. Tidak seperti yang terjadi pada wilayah lain pada umumnya yang relatif berkesesuaian dengan teori yang ada bahwa kemiskinan yang tinggi akan diikuti oleh kejadian kriminalitas yang juga tinggi.

Meningkatnya jumlah penduduk yang digambarkan dengan Kepadatan Penduduk mengakibatkan persaingan yang makin meningkat antar penduduk salahsatunya dalam mendapatkan pekerjaan. Permintaan lapangan pekerjaan juga disesuaikan dengan penyediaan industri yang menampungnya. Jika jumlah industri menurun, maka kesempatan kerja akan semakin menurun dan akan meningkatkan jumlah pengangguran, sehingga timbul berbagai macam aksi kriminalitas. Wilayah yang bercirikan perkotaan salahsatunya memiliki masalah pergerakan (mobilitas) dan perpindahan (migrasi) penduduk yang tinggi.

Walaupun memerlukan kajian lebih lanjut, dapat disimpulkan bahwa variabel kependudukan yang berperan paling besar dalam kaitannya dengan peningkatan kejadian kriminalitas adalah aspek mobilitas dan migrasi penduduk.

Di Provinsi Banten untuk tahun 2012 2013 sampai 2014 Angka Kriminalitas menunjukkan korelasi positif dan signifikan dengan koefisien korelasi sebesar 0,75 itu berkontribusi sebesar 56,25% terhadap Angka Kriminalitas seluruhnya. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa faktor migrasi dan mobilitas penduduk dominan menyebabkan kejadian kriminalitas terjadi disuatu wilayah. Hasil penghitungan ini juga menghasilkan kesimpulan bahwa wilayah yang memiliki angka migrasi dan mobilitas penduduk tinggi diikuti oleh kejadian kriminalitas yang juga tinggi dan begitu pula sebaliknya. `

Saran

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan kesimpulan di atas, maka peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Melaksanakan secara konsisten aturan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan agar semua penduduk terutama migran terdata dengan baik.

- b. Pemerataan pembangunan dan menyediakan lapangan pekerjaan di setiap wilayah terutama desa atau kota-kota kecil lainnya sehingga kepadatan penduduk tidak terkonsentrasi pada satu atau beberapa wilayah saja dan mengantisipasi kejadian kriminalitas akibat migrasi.
- c. Membangun sentra pengembangan ekonomi setempat, misalnya membuka lapangan pekerjaan baru untuk mengatasi permasalahan pengangguran.
- d. Menghidupkan kembali sistem pelaporan dimana setiap pendatang di suatu tempat paling lambat dalam tempo 24 jam harus melapor ke pihak aparat setempat. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pengawasan terhadap kriminalitas akibat mobilitas atau migrasi penduduk.
- e. Diharapkan ada penelitian lanjutan yang mengangkat permasalahan serupa guna mendapatkan gambaran yang menyeluruh dari dampak kependudukan terhadap

kriminalitas. Hal ini merujuk pada hasil penelitian ini yang mengindikasikan aspek migrasi yang memegang peranan dominan terhadap kejadian kriminalitas di Provinsi Banten.

DAFTAR PUSTAKA

- Bintarto, R.,1993, **Urbanisasi dan Permasalahannya**, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- BPS Kabupaten Serang, 2012, **KabupatenSerangDalamAngka 2012**
- Dewi Ayu, dkk. **Analisis Trend Kejahatan Dalam Statistik Kepolisian. Studi Kasus Kota Bandar Lampung tahun 2007-2011**. Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Lampung. 2011
- Direktorat Analisis Dampak Kependudukan **Dampak Kependudukan Terhadap Kriminalitas dan Keamanan Individu**. 2011. BKKBN
- Kantor Menteri Negara Kependudukan (BKKBN) dan Lembaga Demografi FE-UI, Jakarta. 1997. **Mobilitas Penduduk dan Pembangunan Daerah**
- Leonardus, 2012. **Pola Spatial Kriminalitas Pencurian Berdasarkan Faktor Ekologi Kriminal di Kota Malang**. Skripsi Fakultas Tehnik Sipil Institut Tehnologi Nasional Malang.
- Mantra, Ida Bagus, 1984, **Analisa**

- Migrasi Indonesia** 1970-1980,
BPS Jakarta, Indonesia
- Mundiharto, 2000, **Dinamika Kebijakan Kependudukan :Perkembangan, Ekses Negatif, Perbaikan dan Harapan**, Warta Demografi No.1 LembagaDemografi FEUI, Jakarta.
- Soekanto, S. (2004). **Sosiologi Suatu Pengantar**. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tukiran, Abdul Haris, Pande Made Kutanegara, Setiadi. **MobilitasPendudukIndonesia :TinjauanLintasDisiplin**. 2010. Yogyakarta :PusatstudiKependudukan danKebijakanUniversitasGadjahMada
- Yosephine.Susane. 1989. **Faktor-FaktorPenentuMigrasiMasukdanKeluarAntarProvinsi di Indonesia**.Jakarta : Program SarjanaEkonomi, Universitas Indonesia